

PERAN ORGANISASI PETANI DALAM PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI KELUARGA PETANI DI INDONESIA

The Role of Farmers Organization to Improve Family Farmers Economic Welfare in Indonesia

Bayu Budiandrian^{1)*}, Fatima Azzahra²⁾, Arief Setyadi³⁾

¹⁾ Fakultas Ekologi Manusia, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor

²⁾ Fakultas Pertanian, Universitas Singaperbangsa, Karawang

³⁾ Konsultan Penggiat Desa

* E-mail: bayubudiandrian@gmail.com

Diterima: 1 Maret 2022 | Direvisi: 14 Maret 2022 | Disetujui: 29 Maret 2022

ABSTRACT

Agricultural development in Indonesia is a formidable task that cannot be interpreted as a mere government responsibility. Penta-helix collaboration was required prerequisite to improve the quality and quantity of agricultural development in order to achieve common goals. In Indonesia, farmers' organizations have been taking a place in many historical moments, especially in various agrarian movements from time by time. Thus, this study aims to examine the strategies and efforts made by farmer organizations to improve the welfare of family farmers. This study uses a qualitative approach by examining the participation of farmer organizations through programs and services provided to members, and the extent to which these programs and services are correlated with national agricultural development policies. This research was descriptive research that focuses on the programs and services of 5 (five) farmer organizations that are members of the Asia Pacific Farmers' Program (APFP) which are Indonesian Farmers Alliance (API), the Indonesian Farmers Union (SPI), the Farmers Community Network (JAMTANI), the Farmers Community Forum (WAMTI), and the Indonesian Fishermen's Union (SNI). Data collection was carried by snowball and in-depth interviews with organizational members as respondents. The results of this study indicate that it is necessary to strengthen programs and services that are directed not only to increased agricultural productivity but also to reduce the burden on family farmers' expenditures in order to earn more sustainable livelihood.

Keywords: *agriculture development policy, farmers organization, family farmers*

ABSTRAK

Pembangunan pertanian di Indonesia merupakan tugas berat yang tidak bisa dimaknai sebagai tanggungjawab pemerintah semata. Kolaborasi yang bersifat *penta-helix* untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan pertanian di Indonesia merupakan prasyarat yang wajib dipenuhi demi tercapainya cita-cita bersama. Di Indonesia, organisasi tani telah mengambil tempat dalam banyak momentum sejarah, khususnya dalam berbagai gerakan agraria dari masa ke masa. Sajogyo (1965) menyebutkan bahwa organisasi tani merupakan salah satu elemen yang berjasa dalam memelopori riset awal sosiologi pedesaan dan gerakan tani pada masa awal kemerdekaan. Meski demikian, sampai saat ini nasib sebagian besar petani masih belum kunjung sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi dan upaya yang dilakukan organisasi petani untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik kritis untuk mengkaji peran serta organisasi tani melalui program dan layanan yang diberikan kepada anggota, serta sejauh mana kecenderungan program dan layanan tersebut berkorelasi dengan kebijakan pembangunan pertanian secara

nasional. Penelitian ini fokus pada 5 (lima) organisasi tani yang tergabung dalam *Asia Pacific Farmers' Programme* (APFP): Aliansi Petani Indonesia (API), Serikat Petani Indonesia (SPI), Jaringan Masyarakat Tani (JAMTANI), Wahana Masyarakat Tani (WAMTI) dan Serikat Nelayan Indonesia (SNI). Penelusuran informan dilakukan dengan teknik *snowball* dan pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan dialektik dan trialektik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan penguatan program dan layanan yang tidak hanya diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga pada penurunan beban pengeluaran keluarga petani, sehingga penghidupannya lebih berkelanjutan.

Kata kunci: kebijakan pembangunan pertanian, pertanian keluarga, organisasi petani

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian merupakan salah satu bagian penting dari agenda Pembangunan Nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Poin keempat dari RPJMN menyatakan bahwa masyarakat Indonesia diharapkan sudah mandiri, maju, adil dan makmur melalui upaya percepatan pembangunan di berbagai sektor, termasuk pertanian. Pada kenyataannya, sektor pertanian sering diabaikan sehingga sampai saat ini masih menyisakan berbagai permasalahan “klasik” seperti praktek alih fungsi lahan, kemiskinan, produktivitas, kepemilikan dan akses lahan hingga gejolak harga pertanian yang menyulitkan petani.

Ditegaskan juga di dalam RPJMN 2020-2024, bahwa agenda pembangunan pertanian mendapatkan dukungan dari berbagai program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas yang tidak hanya menjadi mandat Kementerian Pertanian saja. Misalnya, terdapat program prioritas “peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk pertumbuhan ekonomi” dimana di dalam program prioritas tersebut terdapat kegiatan prioritas yaitu “penyediaan air untuk sektor pertanian”. Proyek prioritas tersebut mencakup: (1) Pembangunan dan rehabilitasi irigasi; dan (2) Pembangunan sistem penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi untuk perkebunan rakyat, peternakan rakyat,

hortikultura rakyat, dan tambak rakyat. Kedua proyek prioritas ini menjadi mandat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Kebutuhan kolaborasi lintas sektoral dalam Pembangunan Pertanian bisa dilihat dari kerangka Pembangunan Nasional pada matriks lampiran ke III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dimana proyek prioritas strategis dalam skema pembangunan dan penganggaran nasional tidak terbatas hanya bersumber dan untuk dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga Negara saja, tetapi termasuk juga Swasta dan Masyarakat; dari Desa hingga ke Pusat.

Khusus sektor pertanian, terdapat regulasi yang menjadi landasan utama dalam peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam UU tersebut, petani yang dimaksud adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Dengan demikian, pertanian keluarga sudah seharusnya menjadi sasaran utama dalam perlindungan dan pemberdayaan petani di Indonesia.

Perhatian terhadap pertanian keluarga secara internasional juga diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB memberikan pengakuan dan penghargaan kepada keluarga-keluarga petani kecil di dunia atas peran penting mereka dalam menjaga pasokan pangan dunia. Pada tahun 2014 PBB secara resmi mendeklarasikan *International Year of Family Farming*.

Upaya peningkatan kesejahteraan rumahtangga petani atau keluarga petani juga bisa dilihat dari kebijakan reguler pembangunan pertanian di sektor pertanian. Rencana Strategis 2020-2024 Kementerian Pertanian meletakkan pertanian keluarga sebagai salah satu aspek pengarusutamaan kegiatan utama pada periode 2020-2024.

Berdasarkan kerangka logis (*logical framework*) berbagai regulasi dan kebijakan tersebut, dapat diketahui bahwa upaya peningkatan kesejahteraan keluarga petani selain difokuskan pada peningkatan produktivitas usaha pertanian keluarga, juga memerlukan upaya pengurangan beban pengeluaran keluarga petani seperti program bantuan sosial/jaminan sosial, program pengentasan kemiskinan dan program relevan lainnya perlu dipastikan diakses oleh keluarga petani, khususnya kelompok keluarga petani miskin.

Atas berbagai penjelasan diatas, pembangunan pertanian di Indonesia sudah seharusnya dilihat sebagai tugas berat yang tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab dari pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi lintas aktor dan lintas sektoral diantara berbagai pihak untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan pertanian, demi tercapainya cita-cita bersama.

Salah satu pihak yang juga memainkan peranan penting dalam proses pembangunan pertanian, khususnya pasca reformasi tahun 1998 ialah organisasi

petani dan nelayan. Seperti diketahui, pada zaman orde baru, baik organisasi petani dan nelayan hampir seluruhnya pada saat itu adalah organisasi yang dibentuk pemerintah (*top-down*). Pasca reformasi tahun 1998, barulah organisasi petani dan nelayan yang bersifat *bottom-up* saling bermunculan.

Ardhian *et al* (2018) menjelaskan bahwa perkembangan Organisasi Non Pemerintah (ORNOP); termasuk organisasi tani dan nelayan, tidak bisa dilepaskan dari proses demokratisasi lingkungan hidup yang mengalami perkembangan pesat sejak konferensi Bumi diselenggarakan di Rio De Jenairo tahun 1992. Hal tersebut merupakan momentum perubahan kebijakan dan tata kelola lingkungan hidup tidak lagi hanya berpusat pada aktor-aktor negara, namun juga peran organisasi masyarakat sipil sebagai perwakilan aktor non-negara (Guadalope &Rodrigues 2014).

Sementara itu, Purwandari *et al* (2014) menyebutkan bahwa organisasi petani merupakan respon terhadap upaya mewujudkan kemandirian petani melalui pembentukan organisasi sebagai sebuah kelembagaan. Selain itu, pengorganisasian petani dalam berbagai bentuk menjadi sebuah keharusan untuk mengantarkan petani pada posisi yang lebih setara dalam sebuah struktur sosial.

Penelitian Firmansyah *et al* (1999) juga telah berhasil membuktikan bahwa organisasi yang dibentuk oleh petani dapat lebih efektif dan efisien dalam membangun kekuatan petani di tingkat lokal. Keberhasilan tersebut dibuktikan melalui makin banyaknya organisasi petani yang tumbuh dan berhasil mencapai tujuan organisasinya. Lebih jauh lagi, kemunculan organisasi tani dan nelayan yang bersifat *bottom-up* juga telah mempengaruhi berbagai kebijakan terkait dengan pembangunan pertanian melalui berbagai

aksi, strategi, advokasi, maupun pendampingan langsung kepada para petani dan nelayan. Tegasnya, di Indonesia, organisasi tani telah mengambil tempat dalam banyak momentum sejarah, khususnya dalam berbagai gerakan agraria dan pemberdayaan dari masa ke masa. Sajogyo (1965) bahkan telah menyebutkan bahwa organisasi tani merupakan salah satu elemen yang berjasa dalam memelopori riset awal sosiologi pedesaan dan gerakan tani pada masa awal kemerdekaan. Namun, nasib sebagian besar rumah tangga petani dan nelayan masih tidak kunjung membaik sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi dan upaya yang dilakukan organisasi petani untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga petani.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan paradigma postpositivistik dan pendekatan kualitatif dengan teknik penelitian kritis ini mengkaji peran serta organisasi tani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga petani melalui program dan layanan yang diberikan kepada para anggota, serta mengkaji kecenderungan program dan layanan tersebut berkorelasi dengan kebijakan pembangunan pertanian secara nasional.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelusuran informan dilakukan dengan teknik *snow ball* yang berfokus pada lima (5) organisasi petani dan nelayan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober dan November Tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Asia-Pacific Farmers Program (APFP)

Asia-Pacific Farmers Program merupakan perjanjian pendanaan atau hibah yang disepakati oleh *International Fund for*

Agricultural Development (IFAD) dan *Asian Farmers' Association for Sustainable Rural Development* (AFA) dengan nilai sekitar tiga juta Dolar Amerika Serikat (USD 3000000) dan mencakup 29 Negara, termasuk Indonesia salah satunya. APFP sendiri merupakan program yang dirancang untuk menjangkau petani dan produsen pedesaan, terutama rumahtangga petani kecil dan petani produsen yang rentan, melalui media/ wahana organisasi petani.

Program APFP memiliki 3 komponen utama kegiatan pendanaan antara lain; 1.) Pengembangan Layanan Organisasi Petani, 2.) Advokasi Kebijakan, dan 3.) Pengelolaan Program. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan serta untuk pengurangan kemiskinan pedesaan, melalui dukungan instrumental kepada petani kecil pedesaan dan organisasi petani mereka di tingkat nasional, sub-regional dan regional di Asia dan Pasifik. Di Indonesia sendiri, Aliansi Petani Indonesia ditunjuk sebagai *National Implementing Agency* (NIA) atau koordinator program di tingkat Nasional yang bertugas untuk melaksanakan Proyek sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam *Memorandum of Agreement* (MOA).

Selain API sebagai NIA, terdapat 5 organisasi lainnya yang juga terlibat dalam APFP antara lain Serikat Petani Indonesia (SPI), Jaringan Masyarakat Tani (JAMTANI), Wahana Masyarakat Tani (WAMTI), dan Serikat Nelayan Indonesia (SNI). Masing-masing organisasi tersebut menjalankan program APFP sesuai dengan cara pandang dan tujuan organisasinya melalui strategi dan kebutuhan anggotanya.

II. Kewirausahaan yang Dipimpin oleh Petani dan Nelayan

Konsep Kewirausahaan yang Dipimpin oleh Petani dan Nelayan merupakan hasil dari perumusan organisasi

petani atas kondisi petani dan refleksi dari proses pendampingan serta advokasi yang selama ini telah dilakukan sebelumnya. Semua organisasi yang terlibat dalam program APFP menyadari pentingnya peran kewirausahaan dan kelembagaan ekonomi petani (organisasi petani dan koperasi petani) dalam upaya meningkatkan posisi tawar petani pedesaan terhadap kekuatan ekonomi dari luar pedesaan. Lemahnya posisi tawar petani selama ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain lemahnya pengorganisasian kelompok tani, minimnya penguasaan permodalan usaha dan interdependensi yang timpang antara pelaku ekonomi pedesaan dengan luar pedesaan.

Dumasari (2014) telah menyimpulkan bahwa kewirausahaan petani merupakan salah satu kebutuhan yang strategis dalam pengelolaan berbagai jenis bisnis mikro di pedesaan. Selain itu, kewirausahaan petani mempunyai beberapa fungsi strategis bagi pengelolaan bisnis mikro di pedesaan. Pengembangan kewirausahaan juga lebih potensial dilakukan melalui kegiatan non formal dengan pendekatan kelompok secara partisipatif.

Pada lampiran tabel 1, dapat diketahui bahwa jumlah anggota dari masing-masing organisasi terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Jumlah anggota individu Aliansi Petani Indonesia meningkat dari 132.500 anggota di tahun 2015, menjadi 146.546 anggota di tahun 2020 dan tersebar di 66 Kabupaten dengan jumlah kelompok tani yang diorganisir mencapai 2.929 kelompok tani. Jumlah anggota individu Serikat Petani Indonesia meningkat dari 932.283 anggota di tahun 2015 menjadi 1.205.280 anggota di tahun 2020 dan tersebar di 93 Kabupaten dengan jumlah 10.044 kelompok tani yang tercatat diorganisir. Jumlah anggota

individu Wahana Masyarakat Tani meningkat dari 80.000 anggota di tahun 2015 menjadi 121.000 anggota pada tahun 2020 dan tersebar di 39 Kabupaten dengan total 2.420 kelompok yang diorganisir. Jumlah anggota individu Jaringan Masyarakat Tani dari 1.750.000 di tahun 2015 menjadi 2.002.850 di tahun 2020 dan tersebar di 156 Kabupaten dengan total jumlah kelompok sebanyak 87.081 yang diorganisir. Jumlah anggota individu Serikat Nelayan Indonesia juga meningkat lebih dari 2 kali lipat dari 450.000 di tahun 2015 menjadi 1.080.000 anggota di tahun 2020 dan tersebar di 34 Kabupaten dengan jumlah 21.800 kelompok yang diorganisir. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan partisipasi petani dalam berorganisasi.

Upaya pengembangan kewirausahaan yang dipimpin oleh petani diejawantahkan dalam berbagai program penguatan dan layanan ekonomi untuk para anggotanya. Beberapa program tersebut antara lain: (1) peningkatan budidaya dan Produktivitas; (2) dukungan teknis untuk menghasilkan pupuk alami dan Pengendalian Hama; (3) peningkatan Penanganan Pasca Panen (Manajemen Proses dan Kontrol Kualitas); (4) peningkatan Rantai Nilai dan Hubungan Pasar/ Penyaluran; (5) penguatan Manajemen Koperasi dalam Manajemen Keuangan, Akuntansi, Perencanaan Investasi; (6) dukungan Teknis untuk Mengatur/ Mempersiapkan Koperasi Pertanian/ Kelembagaan Perusahaan; dan (7) dukungan Teknis untuk pemuliaan benih.

III. Pembentukan Koperasi dan Usaha Pedesaan (UPED)

Sepanjang pelaksanaan program APFP tahun anggaran 2019 dan 2020, ke lima organisasi telah berhasil membentuk total sebanyak 90 koperasi di berbagai

wilayah dampingan. Pada tabel 2, diketahui bahwa Aliansi Petani Indonesia telah membentuk sebanyak 18 Koperasi dan 2 Usaha Pedesaan, Sementara Serikat Petani Indonesia membentuk sebanyak 47 Koperasi. Untuk Jaringan Masyarakat Tani (JAMTANI) hanya mengembangkan 3 koperasi, namun bisa dikatakan koperasi tersebut berhasil menggerakkan ekonomi petani khususnya di wilayah dampingannya di Pengalengan, Pangandaran dan Cilacap. Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan berhasil membangun 2 Koperasi dan 9 Usaha Desa, sedangkan Serikat Nelayan Indonesia berhasil membentuk 4 koperasi dan 5 usaha desa.

Pada lampiran tabel 3, dapat diketahui bahwa Aliansi Petani Indonesia (API) mengembangkan koperasi dengan berbagai jenis komoditas antara lain kopi, beras organik, kacang mete, kakao, madu hutan, kemiri dan berbagai sayur-sayuran. Dari 20 koperasi, terdapat 17 koperasi dampingan API yang sudah berstatus penguatan, sementara 3 lainnya masih berstatus inisiasi. Adapun jumlah petani individu penerima manfaat sebanyak 17.590 anggota dari total 20 koperasi yang didampingi.

Pada lampiran tabel 4, dapat diketahui bahwa Serikat Petani Indonesia (SPI) mengembangkan sebanyak 47 koperasi dengan komoditas beragam seperti kopi, kakao, beras, jagung, gula aren, madu, bawang, jamur, sayur-sayuran hingga kelapa sawit. Banyaknya jumlah koperasi yang didampingi oleh SPI, tidak terlepas dari bentuk organisasi SPI yaitu federasi. Artinya SPI memiliki struktur organisasi dari pusat sampai ke tingkat akar rumput. Adapun jumlah anggota individu penerima manfaat sebanyak 1.370 anggota dari total 47 koperasi.

Pada lampiran tabel 5, dapat diketahui bahwa Wahana Masyarakat Tani (WAMTI) mengembangkan sebanyak 11 koperasi dengan beragam komoditas antara lain beras, madu, jagung, singkong, kopi, gula aren, hingga pakan ternak. Terdapat 3 koperasi yang telah berstatus lanjutan, sementara 9 lainnya masih berstatus inisiasi. Adapun jumlah penerima manfaat

langsung sebanyak 2.538 anggota individu dari total 11 koperasi.

Pada lampiran tabel 6, dapat diketahui bahwa Jaringan Masyarakat Tani (JAMTANI) mengembangkan 3 koperasi dalam program APFP. 2 koperasi diantaranya sudah sangat maju dan stabil. Sementara terdapat 1 koperasi yang masih berstatus inisiatif. Meskipun hanya mengembangkan 3 koperasi, namun koperasi yang dibangun dan didampingi oleh JAMTANI memiliki prospek dan kematangan yang baik. Hal tersebut terlihat dari besarnya unit usaha dan varian produk yang telah berhasil dikembangkan oleh JAMTANI di 2 Kabupaten yaitu Pangandaran dan Cilacap. Adapun jumlah penerima manfaat langsung dari koperasi yang telah didampingi sebanyak 765 anggota.

Pada lampiran tabel 7, dapat diketahui bahwa terdapat 9 koperasi yang berusaha dikembangkan oleh Serikat Nelayan Indonesia (SNI). Sebanyak 3 Unit koperasi sudah berstatus penguatan, sementara 6 lainnya masih berstatus inisiasi. Adapun komoditas atau produk yang dikembangkan oleh SNI seperti pengolahan abon kepiting/rajungan, budidaya perikanan, produk olahan ikan, pembuatan rengginang tuna, pembudidayaan udang, serta bisnis perdagangan hasil laut. Jumlah penerima manfaat langsung dari pengembangan koperasi ini sebanyak 643 anggota individu dari total 9 koperasi.

Pembentukan koperasi di Desa menurut Sajogyo (1972) dibutuhkan sebagai salah satu alternatif bentuk usaha ekonomi ditengah-tengah beragam bentuk lain organisasi ekonomi yang dibentuk oleh pengusaha swasta dan negara. Organisasi ekonomi berbentuk koperasi di desa, lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat Desa dimana kegiatan ekonomi berpusat pada satuan-satuan usahatani keluarga, yang mengenal "bantu-membantu" antar keluarga (sambatan) dan juga hubungan bekerja upahan satu sama lain (di Jawa). Selain itu, Sajogyo (1972) menambahkan bahwa persatuan petani juga penting untuk dilakukan disamping membangun koperasi sebagai sarana ekonomi masyarakat Desa.

Dengan demikian, berdasarkan data-data diatas, dapatlah disimpulkan bahwa organisasi petani memiliki peranan yang sangat vital dalam upaya meningkatkan kemandirian rumah tangga petani dan nelayan ditingkat akar rumput. Tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, lebih jauh lagi keberadaan organisasi petani juga dapat membuat petani dan nelayan memiliki posisi tawar yang lebih untuk memastikan hak ekonomi, sosial, politik, dan budaya petani dan nelayan terpenuhi.

IV. Peran dan Tantangan Organisasi Petani Kedepan

Peran organisasi petani dapat dilihat sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian dan pedesaan karena memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarga petani dengan cara yang beragam. Pembangunan Pedesaan menurut Sajogyo (1982) adalah apa yang dilakukan masyarakat pedesaan di dalam berusaha mencapai cita-cita hidup bermasyarakat dengan tujuan yang sama, meskipun caranya berbeda-beda.

Studi Ardhian (2016) mengemukakan bahwa strategi Organisasi Non Pemerintah dalam arena pertarungan politik dapat berbeda satu sama lain. Ada strategi penguasaan pengetahuan, strategi mobilisasi, strategi advokasi, strategi aksi-komunikasi dan sebagainya.

Khusus untuk penelitian ini, organisasi petani memiliki peranan penting untuk memastikan kondisi kesejahteraan anggota. Keanggotaan pada organisasi petani harus mampu memastikan kelompok miskin atau petani *landless* terfasilitasi dengan adanya program-program yang dilakukan oleh organisasi petani.

Organisasi petani memiliki peranan penting untuk memfasilitasi serta mengadvokasi registrasi kependudukan anggotanya, seperti Kartu Tanda Penduduk, Buku Nikah, Akta Kelahiran, dan semacamnya, guna memastikan anggotanya bisa mendapatkan akses dari berbagai bantuan (langsung maupun tidak langsung)

dan program-program pemerintah dari tingkat daerah sampai pusat.

Organisasi petani diharapkan melakukan profiling dengan memasukan unsur “kepesertaan anggotanya sebagai sasaran program” seperti DTKS-Kemensos, SDGs Desa-Kemendesa, KK-BKKBN, Poktan, dll. Hal tersebut menjadi penting, karena kerangka berpikir dalam studi pelingkupan ini tidak hanya mencakup peningkatan produktifitas petani, tetapi juga mencakup pengurangan beban pengeluaran petani.

Organisasi petani kedepan diharapkan mampu mendesain program-program yang relevan dengan RPJMN/RPJP/SGDs, guna meningkatkan kualitas dan kuantitas kolaborasi antara diantara berbagai pihak, khususnya Pemerintah.

Berdasarkan hasil *assessment* singkat di dua organisasi tani, yaitu JAMTANI dan SNI dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut: a.) Penguatan kelembagaan organisasi petani tetap perlu dilakukan secara terus-menerus dan bertahap agar terjadi demokratisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada seluruh anggota. b.) Pembentukan koperasi-koperasi ditingkat lokal sudah dilakukan, meskipun belum didasarkan pada orientasi market driven. c.) Aspek Keberlanjutan program menjadi isu penting yang harus dipertimbangkan oleh organisasi petani dalam menyusun kerangka kegiatan atau program. d.) Inovasi langkah-langkah fasilitasi oleh organisasi petani juga penting untuk dilakukan mengingat adanya keragaman maturity atau kemapanaan dari masing-masing organisasi petani. Benchmarking studi diantara sesama FO dapat dilakukan. e.) Peningkatan produktifitas petani kecil harus dilandaskan pada model pertanian keluarga yang inklusif dengan mengembangkan konsep “kewirausahaan yang dipimpin oleh petani”. Artinya, keanggotaan di dalam organisasi petani harus mampu mendapatkan value chain dari setiap mata rantai produksi (*pre-production – post harvesting*) pertanian dan perikanan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan dan program yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga petani terdapat pada lingkup kegiatan yang tidak terbatas di sektor pertanian yang semakin prospektif diakses oleh keluarga petani untuk penurunan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan kepemilikan aset keluarga untuk penghidupan yang berkelanjutan.

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi digital disektor pertanian telah mengubah ekosistem usaha pertanian yang lebih terbuka dan membuka peluang keterlibatan keluarga petani dalam korporatisasi usaha pertanian.

Keluarga Petani memerlukan aksi kolaborasi bersama pemerintah, swasta, LSM, dan lembaga relevan lainnya untuk memperoleh akses sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan peningkatan produktivitas yang meningkatkan kepemilikan aset keluarga.

Keluarga petani memerlukan kepastian keterlibatan dalam pengelolaan sumberdaya pembangunan di desa, baik akses, manfaat, maupun kontrol dalam mekanisme formal pembangunan desa.

Keluarga petani memerlukan fasilitasi agar terampil dalam penggunaan teknologi digital dalam peningkatan akses layanan sosial dasar maupun akses dukungan peningkatan produktivitas baik dalam basis kegiatan on farm, off-farm maupun non-farm.

REFERENSI

Anantanyu, S. (2011). Kelembagaan Petani: Peran Dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. *SEPA : Vol. 7 No.2 Pebruari 2011 : 102 – 109*. <https://jurnal.uns.ac.id/sepa/article/view/48895>

Ardhian, D., Adiwibowo, S., Wahyuni, ES.

(2016). Peran Dan Strategi Organisasi Non Pemerintah Dalam Arena Politik Lingkungan Hidup. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Desember 2016, hal 210-216 | 212*. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/download/14429/10697/>

Batubara, AA. (2021). Peran Organisasi Dalam Aksi Sosial Masyarakat Tani (Studi Pada Serikat Petani Indonesia Wilayah Sumatera Utara). Universitas Sumatera Utara.

Bryant, RL., Bailey, S. (1997). *Third World Political Ecology*. Routledge

Dumasari. (2014). Kewirausahaan Petani Dalam Pengelolaan Bisnis Mikro di Pedesaan. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan: No. 3, September 2014 Halaman 196-202*. <https://journal.uui.ac.id/ajie/article/download/4079/3633>

Purwandari, H., Kolopaking, LM., Tonny, F. (2015). Perlawanan Tersamar Organisasi Petani: Sinergi Antara Kepentingan Pembangunan Dan Kepentingan Gerakan Sosial. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol. 6 No. 3 (2012): Sodality* |<https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/8019>

Rachman, NF. (2005). *Memahami Gerakan Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Insist Press.

Rachman, NF. (2012). *Land Reform dari Masa ke Masa*. Tanah Air Beta.

Sajogyo. (1965). *Research Sosiologi Pedesaan di Indonesia 1945-1965*. Departemen Urusan Research Nasional Republik Indonesia.

Sajogyo. (1972). *Koperasi Sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat Desa*. Seminar Koperasi ke-25 Kota Madya – Kabupaten Bogor.

Sajogyo. (1982). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan*. Lokakarya II Langkah-Langkah operasional perencanaan pembangunan dari bawah dalam rangka pemantapan pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi.

Sajogyo. (2006). *Ekososiologi;*

Deideologisasi Teori, Restrukturisasi Aksi (Petani dan Perdesaan sebagai Kasus Uji). Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas.

Tjondronegoro, SMP., Wiradi, G. (2008). *Dua Abad Penguasaan Tanah; Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Yayasan Obor Indonesia.

Lampiran

Tabel 1. Jumlah dan Sebaran Anggota Organisasi

Nama Organisasi	Tahun	Sebaran Kabupaten	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota Individu	Jumlah Anggota Laki-Laki	Jumlah Anggota Perempuan
API	2015	49	2.650	132.500	99.375	33.125
	2016	49	2.650	132.500	99.375	33.125
	2017	64	2.812	140.597	105.448	35.149
	2018	64	2.812	140.597	105.448	35.149
	2019	64	2.812	140.597	105.448	35.149
	2020	66	2.929	146.456	109.842	36.614
SPI	2015	73	7.227	932.283	792.441	139.842
	2016	85	8.415	1.085.535	900.994	184.541
	2017	92	9.108	1.174.932	963.444	211.488
	2018	93	9.207	1.187.703	950.162	237.541
	2019	93	10.044	1.205.280	952.171	253.109
	2020	93	10.044	1.205.280	952.171	253.109
WAMTI	2015	11	1.600	80.000	72.000	8.000
	2016	14	1.700	85.000	73.950	11.050
	2017	16	1.800	90.000	76.500	13.500
	2018	16	1.800	90.000	76.500	13.500
	2019	18	2.400	120.000	84.000	36.000
	2020	39	2.420	121.000	84.700	36.300
IPPHTI/ JAMTANI	2015	147	83.000	1.750.000	1.400.000	350.000
	2016	156	83.500	1.800.000	1.404.000	396.000
	2017	156	85.000	1.900.000	1.425.000	475.000
	2018	156	87.000	2.000.000	1.400.000	600.000
	2019	156	87.000	2.000.000	1.400.000	600.000
SNI	2020	156	87.081	2.002.850	1.401.995	600.855
	2015	22	9.000	450.000	405.000	45.000
	2016	25	15.000	750.000	675.000	75.000
	2017	28	18.000	900.000	810.000	90.000
	2018	33	21.600	1.080.000	972.000	108.000
	2019	33	21.600	1.080.000	972.000	108.000
	2020	34	21.800	1.080.000	972.000	108.000

Sumber: Aliansi Petani Indonesia, 2021

Tabel 2. Jumlah Koperasi dan Usaha Pedesaan (UPED) yang Diorganisir

No.	Organisasi	Jumlah Koperasi/ Usaha Pedesaan (UPED)		Total
		Koperasi	Usaha Pedesaan	
1.	Aliansi Petani Indonesia (API)	18	2	20
2.	Serikat Petani Indonesia (SPI)	47		47
3.	Ikatan Petani Pengedali Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI/JAMTANI)	3		3
4.	Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI)	2	9	11
5.	Serikat nelayan Indonesia (SNI)	4	5	9
Total		74	16	90

Sumber: Aliansi Petani Indonesia, 2021

Tabel 3. Koperasi Pertanian yang Dibentuk oleh Aliansi Petani Indonesia

No.	Nama Koperasi	Komoditas/ Produksi	Status Perkembangan		Jumlah Anggota Penerima Manfaat
			Inisiasi	Penguatan	
1.	Asosiasi Petani Sridonoretno (SDR)	Kopi	✓		452
2.	Asosiasi Petani Kopi Manggarai	Kopi		✓	914
3.	Koperasi Primavera Pertamata	Kopi		✓	211
4.	Paguyuban Petani Kopi Toraja (PPKT)	Kopi		✓	1.736
5.	Koperasi Koerici Barokah	Kopi		✓	500
6.	APPOLI/ Koperasi Treno Tani	Beras Organik		✓	1.224
7.	Koperasi Mentari Sinari Alam (MSA)	Beras Organik		✓	600
8.	Koperasi Serikat Petani Tuban (SPT)	Beras Premium		✓	1.000
9.	Koperasi Amanah	Kakao		✓	1.600
10.	ORTABUN/ Koperasi Sinar Kakao	Kakao		✓	1.300
11.	Koperasi STJ/KPAL	Kakao		✓	663
12.	Koperasi Masagena	Kakao		✓	2.424
13.	Koperasi SIKAP	Kacang Mete		✓	1.000
14.	Koperasi JANTAN	Kemiri		✓	600
15.	STUK/Koperasi Hanjuang	Madu Hutan		✓	500
16.	Koperasi Komunitas Brenjong	Sayur-Sayuran		✓	1.000
17.	Koperasi Agro Makmur	Kelapa Sawit		✓	1500
18.	Koperasi Tani Sakti Alam Kerinci	Kayu Manis		✓	143
19.	Amarta-PADI Blitar (Rural Enterprise)	Beras	✓		30
20.	Amarta-Padi Indramayu (Rural Enterprise)	Beras	✓		193
Total					17.590

Sumber: Aliansi Petani Indonesia, 2021

Tabel 4. Koperasi Pertanian yang Dibentuk oleh Serikat Petani Indonesia (SPI)

No.	Nama Koperasi	Komoditas/ Produksi	Status Perkembangan		Jumlah Anggota Penerima Manfaat
			Inisiasi	Penguatan	
1.	Koperasi Tugu Rejo	Kopi	✓		33
2.	Koperasi Bukit Sari	Kopi	✓		31
3.	Koperasi Bandung Baru	Kopi	✓		22
4.	Koperasi Bandung Jaya	Kopi	✓		25
5.	Koperasi Rimbo Recap	Kopi	✓		47
6.	Koperasi Merangin	Kopi	✓		50
7.	Koperasi Tanjung Jabung Timur	Beras	✓		33
8.	Koperasi Simpang Datuk	Beras	✓		28
9.	Koperasi Produsen Muaro Jambi	Beras	✓		25
10.	Koperasi Lampung	Beras	✓		30
11.	Koperasi Tanggamus	Kakao dan Kopi	✓		21
12.	Koperasi Kota Medan	Kedai Kopi	✓		50
13.	Koperasi Bukit Kijang	Kelapa Sawit		✓	33
14.	Koperasi Suka Maju	Kelapa Sawit	✓		39
15.	Koperasi Tangga	Kelapa Sawit	✓		27
16.	Koperasi Aekuasan	Kelapa Sawit	✓		21
17.	Koperasi Simpang Kopas	Kelapa Sawit	✓		22
18.	Koperasi Pamah	Gula Aren	✓		36
19.	Koperasi Sei Litur	Jagung dan Karet	✓		33
20.	Koperasi Mekar Jaya	Jagung dan Karet	✓		29
21.	Koperasi Padang Lawas	Kedai Kopi dan Sawit	✓		34
22.	Koperasi Damak Maliho	Peternakan	✓		20
23.	Koperasi Labuhan Batu Utara	Kelapa Sawit	✓		22
24.	Koperasi Bah Biak	Kopi	✓		21
25.	Koperasi Ambarisan	Kopi	✓		23
26.	Koperasi Situjuh Gadang	Kopi	✓		26
27.	Koperasi Sumatera Barat	Jamur	✓		22
28.	Kopereasi Mabar	Gula Merah	✓		21
29.	Koperasi Kinali	Sayur-Sayuran	✓		23
30.	Koperasi Baliri	Process product	✓		29
31.	Koperasi Tuturan	Kakao	✓		24
32.	Koperasi Rao Rao	Bawang	✓		22
33.	Koperasi Sibaladuang	Jamur	✓		25
34.	Koperasi Banten	Kopi dan Gula Aren	✓		23
35.	Koperasi Mandiri	VCO	✓		20
36.	Koperasi Sangiang Dora	Kopi	✓		20
37.	Koperasi Petani Bogor	Sayur-Sayuran	✓		21
38.	Koperasi Pasir Datar	Sayur-Sayuran	✓		36
39.	Koperasi Petani Kampar	Kelapa Sawit	✓		33
40.	Koperasi Petani Logas	Kelapa Sawit	✓		32
41.	Gasrisma	Kelapa Sawit	✓		75
42.	Koperasi Petani Yogyakarta	processed food	✓		22
43.	Koperasi Petani Tuban	Beras	✓		30
44.	Koperasi Petani Lelak	Kopi	✓		23
45.	Koperasi Petani Jawa Timur	Beras	✓		22
46.	Koperasi Petani Jawa Tengah	Sayur-Sayuran	✓		20
47.	Koperasi Petani Nasional	Madu dan Kopi	✓		46
		Total			1.370

Sumber: Aliansi Petani Indonesia, 2021

Tabel 5. Koperasi Pertanian yang Dibentuk oleh WAMTI

No.	Nama Koperasi	Komoditas/ Produksi	Status Perkembangan		Jumlah Anggota Penerima Manfaat
			Inisiasi	Penguatan	
1.	Koperasi Usaha Petani Indonesia (KUPI)	Beras		✓	28
2.	Koperasi Berkah, Wamti Pandeglang	Madu		✓	150
3.	Koperasi Tani Bangkit, Wamti Demak	Jagung	✓		20
4.	Koperasi Darul Usaha, Wamti Subang	Beras	✓		250
5.	Koperasi Medal Setia, Wamti Purwakarta	Sayur-Sayuran	✓		260
6.	Koperasi Wamti Lampung Utara	Singkong	✓		600
7.	Koperasi Wamti Indramayu	Pupuk Tanah	✓		50
8.	Koperasi Wamti Lebak	Gula Aren	✓		100
9.	Koperasi Wamti Lampung	Singkong	✓		250
10.	Koperasi Pemuda Agri Nusa, Wamti Waingapu	Pakan Ternak	✓		80
11.	Koperasi Mata Kopi, Wamti Kab. Bandung	Kopi		✓	750
Total					2.538

Sumber: Aliansi Petani Indonesia, 2021

Tabel 6. Koperasi Pertanian yang Dibentuk oleh IPPHTI/JAMTANI

No.	Nama Koperasi	Komoditas/ Produksi	Status Perkembangan		Jumlah Anggota Penerima Manfaat
			Inisiasi	Penguatan	
1.	Koperasi July Tani	Cabai Merah		✓	54
2.	Koperasi Produksi JAMTANI	Produk Budidaya Pertanian dan Perikanan		✓	432
3.	Koperasi Petani Hortikultura Pangalengan	Sayur-sayuran	✓		279
Total					765

Sumber: Aliansi Petani Indonesia, 2021

Tabel 7. Koperasi Pertanian yang Dibentuk oleh Serikat Nelayan Indonesia (SNI)

No.	Nama Koperasi	Komoditas/ Produksi	Status Perkembangan		Jumlah Anggota Penerima Manfaat
			Inisiasi	Penguatan	
1.	Koperasi Nelayan Mandiri	Olahan ikan		✓	165
2.	Koperasi Mina Tani Jaya Sentosa	Budidaya Perikanan		✓	21
3.	Koperasi Nelayan Suta Bahari	Perdagangan	✓		70
4.	koperasi Nelayan Subur Laut	Udang	✓		167
5.	Kelompok usaha wanita ikan mas	Tuna	✓		55
6.	Kelompok usaha nyi endang	Tuna	✓		30
7.	Kelompok usaha dewi sartika	Rengginang Tuna	✓		30
8.	Kelompok usaha nyi endang gelis	Keripik olahan ikan	✓		30
9.	Kelompok usaha gebang sejahtera	Abon Kepiting/Rajungan		✓	75
Total					643

Sumber: Aliansi Petani Indonesia, 2021